

**SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KETIDAKPATUHAN  
WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN AGAM**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Menyelesaikan Program S1 Pada Fakultas  
Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

**SUCI RAHMA NADA**

**2110113067**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)**



**PEMBIMBING :**

**Gusminarti, S.H., M.H**

**Hendria Fithrina, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2025**

	No. Alumni Universitas	<b>Suci Rahma Nada</b>	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Lubuk Basung/ 22 Oktober 2002 b. Nama Orangtua : Erinaldi, Darmiyanti c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Administrasi Negara e. No. BP : 2110113067	f. Tanggal Lulus : 11 Agustus 2025 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun 0 Bulan i. IPK : 3,91 j. Alamat : Lansano, Lubuk Basung, Agam	

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN AGAM**

*(Suci Rahma Nada, 2110113967, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2025)*

**ABSTRAK**

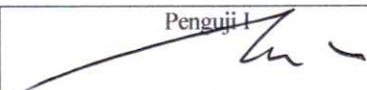
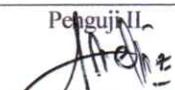
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang berada di wilayah perdesaan dan perkotaan. PBB-P2 merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat, namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Terakhir dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Agam masih tergolong rendah, yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan informasi, serta kendala ekonomi, sehingga tidak jarang berujung pada pemberian sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Agam? 2. Bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Agam? 3. Bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Agam dalam mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Agam?.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan hukum positif serta analisis terhadap data lapangan melalui wawancara dan dokumentasi di instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutan PBB-P2 yang diterapkan di Kabupaten Agam, mulai dari pendataan objek pajak, penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), hingga mekanisme pembayaran yang dapat dilakukan melalui berbagai kanal resmi seperti Bank Nagari dan aplikasi digital. Prosedur tersebut melibatkan petugas pemungut yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan didukung pendataan yang terus diperbarui untuk memastikan akurasi data objek dan subjek pajak. Selain itu, penelitian mengevaluasi penerapan sanksi administrasi, yaitu denda 1% per bulan bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak melakukan pembayaran PBB-P2, serta faktor-faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kesadaran wajib pajak. Selanjutnya, upaya pemerintah daerah dalam mengatasi ketidakpatuhan meliputi optimalisasi pendataan melalui pelibatan masyarakat dan teknologi digital, edukasi wajib pajak, penguatan kerja sama dengan pemerintah nagari, dan monitoring evaluasi rutin guna meningkatkan kepatuhan dan pendapatan asli daerah.

**Kata kunci: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Sanksi Administrasi, Kepatuhan**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 11 Agustus 2025

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I 	Penguji II 
Suci Rahma Nada	<b>Dr. Anton Rosari, S.H., M.H.</b>	<b>Amelia Zulfitri, S.H., M.H.</b>

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara: **Hendria Fithrina, S.H., M.H.**

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	<b>Suci Rahma Nada</b>	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : Lubuk Basung /22 <sup>nd</sup> October 2002	f. Graduation Date : August 11 <sup>th</sup> 2025	g. Pass Predicate : Cumlaude
b. Parents' Name : Erinaldi, Darmiyanti	h. Length of Study : 4 years 0 month	i. GPA : 3,91	j. Address : Lansano, Lubuk Basung, Agam
c. Faculty : Law			
d. Concentration : Administrative Law			
e. Student ID : 2110113067			

**APPLICATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR TAXPAYER NON COMPLIANCE IN PAYMENT OF RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX IN AGAM REGENCY**

*(Suci Rahma Nada, 2110113067, Concentration Program Administrative Law (CP VII), Faculty of Law, Andalas University, 2025)*

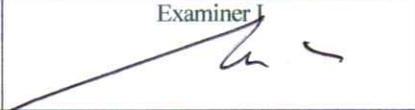
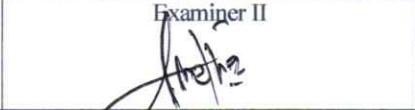
**ABSTRACT**

Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is a type of regional tax imposed on the ownership or use of land and/or buildings located in rural and urban areas. PBB-P2 is part of the tax reform that was previously managed by the central government, but since the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions, its management has been handed over to the district/city government. Lastly, it was refined by Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments. The level of taxpayer compliance in paying Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Agam Regency is still relatively low, which is caused by a lack of public awareness, limited information, and economic constraints, so that it often results in the imposition of administrative sanctions in accordance with applicable provisions. The formulation of the problems discussed in this thesis are: 1. How is the mechanism for fulfilling PBB-P2 collection in Agam Regency? 2. How is the application of administrative sanctions against taxpayers who do not comply with PBB-P2 payments in Agam Regency? 3. How is the follow-up of the Agam Regency local government in overcoming taxpayer non-compliance in paying PBB-P2 in Agam Regency?. The research method used is empirical juridical, with a positive legal approach and analysis of field data through interviews and documentation at relevant agencies. The results of the study indicate that the PBB-P2 collection procedures implemented in Agam Regency, starting from data collection of tax objects, issuance of Tax SPPT, to payment mechanisms that can be made through various official channels such as Bank Nagari and digital applications. The procedure involves collection officers appointed by the Village Head and supported by continuously updated data collection to ensure the accuracy of data on tax objects and subjects. In addition, the study evaluates the implementation of administrative sanctions, namely a fine of 1% per month for taxpayers who are late or do not make PBB-P2 payments, as well as inhibiting factors such as limited human resources and taxpayer awareness. Furthermore, local government efforts to overcome non-compliance include optimizing data collection through community involvement and digital technology, taxpayer education, strengthening cooperation with the village government, and routine monitoring and evaluation.

**Keywords: Rural and Urban Land and Building Tax, Administrative Sanctions, Compliance**

This minor thesis has defended in front of the examiner team at August 11<sup>th</sup>, 2025.

Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II
		
Suci Rahma Nada	Dr. Anton Rosari, S.H., M.H	Amelia Zulfitri, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of Administrative Law: **Hendria Fithrina, S.H., M.H.**

  
Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Faculty Alumni	Name:	Signature:
No. University Alumni	Name:	Signature: